



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten dharmasraya



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Peta	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. 1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	3
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	5
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	13
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .	13
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	15
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	16
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	18
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	35
BAB 8. PENUTUP	8-37

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan *).....	Kabupaten Dharmasraya	
Tabel 2-2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan *	Kabupaten Dharmasraya.....	
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....		
Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan		
Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....		31
Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....		

DAFTAR PETA

DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan di bidang perhubungan, Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya, disamping itu juga mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan resmi Dinas Perhubungan berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

1.2. 1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Dharmasraya No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan.
2. Mendorong penguatan fungsi Dinas Perhubungan sebagai institusi perencanaan daerah.
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub

Provins

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

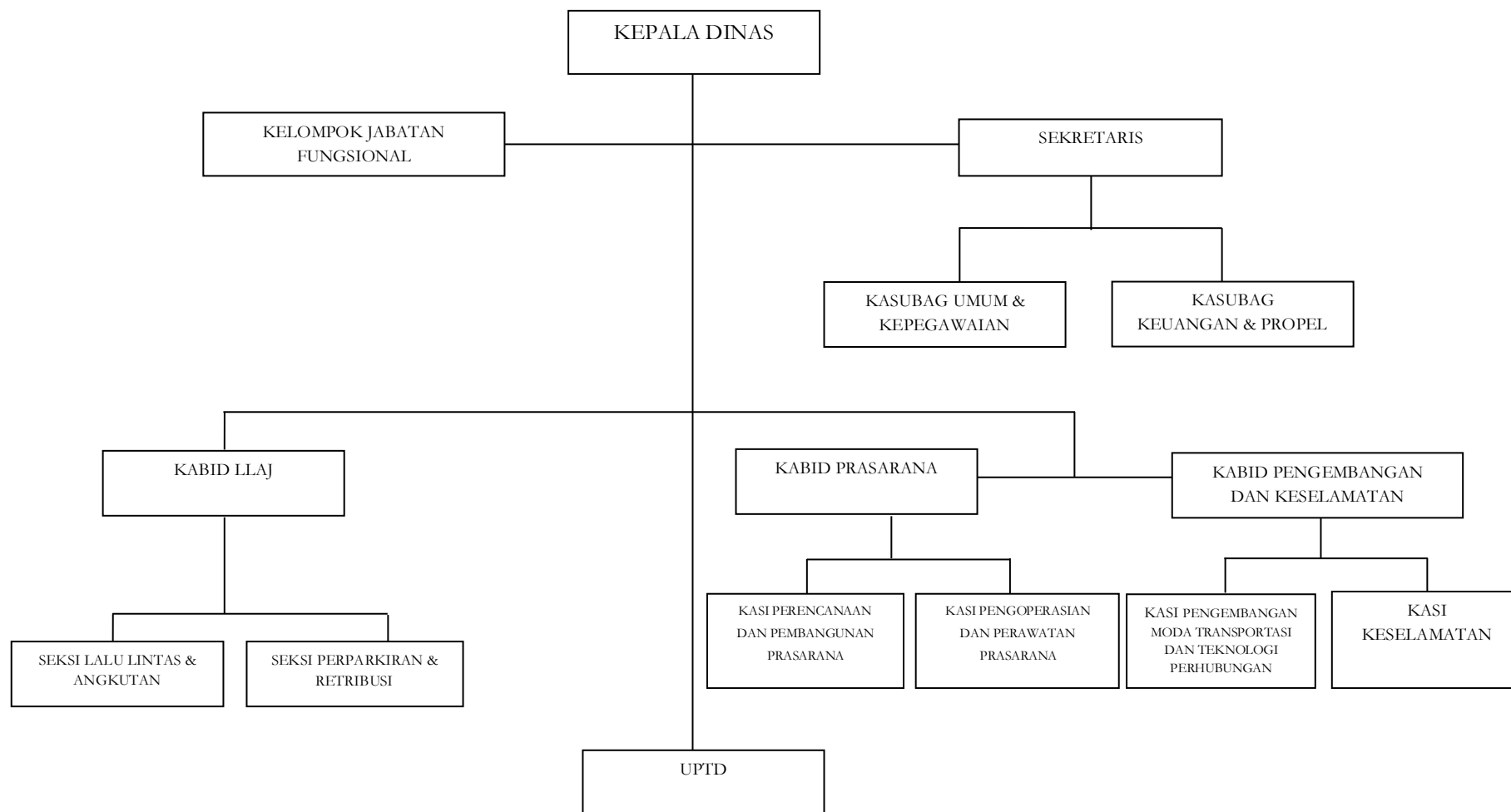
BAB VIII PENUTUP

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan atau disingkat dengan Dishub Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perda tersebut Dinas Perhubungan Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

**Gambar 1. Struktur organisasi dan tata kerja
Dinas Perhubungan Kabupeten Dharmasraya Tahun 2021**



Dilihat dari Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1) Kepala Dishub

Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.

2) Sekretaris Dishub

Sekretaris Dishub yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kasubag, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan.

3) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 2 (tiga) Kasi, yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas dan angkutan, dan Kepala Seksi Perparkir dan redistribusi.

4) Kepala Bidang Prasarana

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana, Keselamatan dan Pengembangan Transportasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 2 (tiga) Kasi, yaitu Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, Kepala Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana

5) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Pengembangan, Keselamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh

2(tiga) Kasi, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Moda Transportasi dan Teknologi Perhubungan, Kepala Seksi keselamatan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset/Modal yang dimiliki oleh Dishub :

✓ Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dishub didukung oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur sebanyak 171 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	0
2	S-2	3
3	S1	33
4	D IV	-
5	D III	3
6	D II	2
7	SMA/ SMEA/ STM	139
8	SMP	1
4	SD	-
Jumlah		171

Sumber daya manusia yang dimiliki Dishub Kabupaten Dharmasraya saat ini berdasarkan tabel 2.1 di atas, sedangkan tingkat golongan personel Dishub dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Esselon II a	-
2	Esselon II b	1

3	Eselon III a	1
4	Eselon III b	2
5	Eselon IV a	7
6	Eselon IV b	1
7	Staf/ Fungsional Umum	17
8	Jabatan Fungsional	-
9	PTT	3
10	THL	139
	Jumlah	171

Sumber daya manusia yang dimiliki Dishub Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 28 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 3 orang Honor Daerah 139 personil pegawai tidak tetap PTT/THL/Sukarela.

✓ Asset/Modal

Saat ini Dishub masih menempati gedung kantor yang belum representatif, dan sudah didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit, sepeda motor 5 unit, serta masih perlu penambahan fasilitas pendukung kerja seperti laptop, printer serta aset lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kerja Dishub.

Adapun rekapitulasi aset Dishub per-Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Aset Dishub Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kelompok Barang	Jumlah
1	Tanah	2.993.200.000,00
2	Gedung kantor	1 unit
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	4 unit
4	Kendaraan Dinas Roda dua	5 unit
5	Komputer	8
6	Laptop	5
7	Lemari Arsip	2
8	Meja Kerja	24

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya pada prinsipnya diarahkan untuk terwujudnya keamanan berlalu dan kelancaran transportasi serta meningkatnya konektifitas dan pelayanan perhubungan kabupaten dharmasraya. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja dari dinas perhubungan dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib bukan pelayanan dasar. Untuk melihat capaian kinerja organisasi dinas Perhubungan dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2016 – 2021) dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat	C	CC	B	BB	BB
		Meningkatnya keselamatan transportasi	Jumlah kasus kecelakaan	N/A	64	78	87	76
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	N/A	22	100	109	75
			Persentase keterpasangan marka jalan	N/A	N/A	1,20	0,064	1,544
			Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	4 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan
			Jumlah trayek angkutan umum	N/A	N/A	1 izin	1 izin	1 izin
			Jumlah terminal	N/A	N/A	1 Terminal	1 Terminal	1 Terminal
			Jumlah fasilitas parkir umum	N/A	N/A	6	6	6
		Meningkatnya pengawasan bidang transportasi	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	N/A	N/A	C	C	B
			Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	N/A	78,76	75	60	87

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun berkenaan dengan penegakkan perda dan perkara yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya Dinas perhubungan dengan lulusan khusus perhubungan maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	TANTANGAN	PELUANG
Meningkatkan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	<p>Dengan kurangnya/minimnya rambu-rambu jalan maka menimbulkan ketidak nyamanan, ketidak amanan dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat</p> <p>a. Ketersediaan anggaran yang belum memadai</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang belum memadai</p>	<p>Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 139, diamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin tersedianya angkutan umum.</p> <p>Dan secara khusus pada Pasal 139 ayat (3) disebutkan bahwa <i>“Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang dalam wilayah Kabupaten/ Kota”</i>.</p> <p>Tersedianya kesempatan yang seluas-luasnya dari kementerian perhubungan jika memungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak balai untuk kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan dana APBD/DAK</p>
Manajemen rekayasa lalu lintas	<p>Dengan kurangnya/minimnya rambu-rambu jalan maka menimbulkan</p>	<p>Terjadinya kelancaran transpormasi di kabupaten dharmasraya</p>

	<p>ketidak nyamanan, ketidak amanan dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat</p> <p>Masih kurangnya tenaga ahli di dinas perhubungan dharmastraya</p>	
Optimalisasi Pelayanan Perhubungan	<p>Sulitnya pengendalian arus lalu lintas sehingga menghambat kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas dikarenakan kurangnya kendaraan layak uji</p> <p>Daerah yang sangat luas sehingga untuk mendata memerlukan SDM dan anggaran</p> <p>Masih kurangnya tenaga ahli di dinas perhubungan dharmastraya</p> <p>Saat ini pelajar/mahasiswa sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke sekolahnya, padahal mayoritas dari pelajar/mahasiswa tidak/ belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.</p> <p>Dengan banyak pelajar/mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi, mengakibatkan kepadatan lalu lintas di jalan dan karena sebagian besar mereka</p>	<p>Dengan tersedianya kelengkapan dan pelayanan pengujian maka meningkatnya kendaraan yang melakukan uji kendaraan</p>

	tidak memahami aturan berkendara yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas	
Mengembangkan simpul jaringan transportasi terpadu	Pada Tahun 2018 Dinas Perhubungan mencoba membuka line trayek sebanyak 6 (enam) rute, namun terkendala dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang mendukung	Dengan adanya 6 (enam) line trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Dharma Raya pada Tahun 2018, hal ini sangat membuka peluang bagi pengusaha transportasi untuk menyediakan kendaraan umum

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu
1	Meningkatkan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Meningkat	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai target, karena kurangnya anggaran dan Banyaknya ruas jalan, dan daerah yang rawan kecelakaan	Meningkatkan ketersediaan prasarana lalu lintas sosialisasi berlalu lintas yang baik
2	Manajemen rekayasa lalu lintas	meningkat	Masih banyaknya jalur jalan yang kecil yang menimbulkan ssusahny akses	Meningkanya jalan yang layak dan bisa dilalui

			lalu lintas, belum adanya jalan alternatif jalan	
3	Optimalisasi Pelayanan Perhubungan	meningkat	Masih terbatasnya sarana pelayanan angkutan dan kesadaran masyarakat melakukan pengujian kendaraan	Meningkatnya Jumlah kendaraan yang layak uji dan sesuai standar pengujian
4	Mengembangkan simpul jaringan transportasi terpadu yang dilalui oleh angkutan umum	meningkat	Masih belum adanya terminal presentatif, masih terbatasnya akses konektifitas antar kecamatan dan kurangnya jalan yang layak jalan	Meningkatnya akses transportasi ke seluruh daerah

Secara umum permasalahan-permasalahan di bidang perhubungan dalam pengembangannya, yakni sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di daerah Kab. Dharmasraya yang antara lain diakibatkan tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya penggunaan kendaraan, sangat banyak daerah yang kondisinya rawan kecelakaan di daerah Kab. Dharmasraya yang antara lain diakibatkan oleh tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan dan masih kurangnya kelengkapan pemasangan perlengkapan jalan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya maju yang mandiri dan berbudaya”

Pengertian dari visi :

○ **Maju :**

Kabupaten dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berbudaya sai pada wilayah bagian tenggara provinsi sumatera barat

○ **Mandiri :**

- .Kondisi daerah yang memiliki daya daya tanah social, ekonomi dan keuangan daerah serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

○ **Berbudaya :**

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multicurtural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastruktur
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatnya potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatnya nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dinas Perhubungan sebagai SKPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian.

Misi 1 yaitu : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong produktifitas ekonomi dan pelayanan masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMBAR

A. Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama; b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru; c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara; d) Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%; e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayanan;

		<p>f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder;</p> <p>g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut;</p> <p>h) Dwelling time pelabuhan;</p> <p>i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayannya 193 lintas angkutan laut perintis;</p> <p>j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer;</p> <p>k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros-poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;</p> <p>l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.</p>
2	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global	<p>a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta</p>

		<p>dalam penyediaan armada kapal;</p> <p>b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;</p> <p>c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya;</p> <p>d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;</p> <p>e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;</p> <p>f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline;</p> <p>g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;</p> <p>h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.</p>
3	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	<p>a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline;</p> <p>b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan</p>

		<p>AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;</p> <p>c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun;</p> <p>d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;</p> <p>e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.</p>
4	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	<p>Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar 2,982 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.</p>
5	Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	<p>a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan;</p> <p>b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.</p>

6	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	<p>a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/metropolitan/besar minimal 32 %;</p> <p>b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.</p>
7	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
8	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan	<p>a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi;</p> <p>b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;</p> <p>c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor pendorong

Banyaknya insdustri CPO/Kelapa sawit

Banyaknya industri tambang batu bara

Medan yang dilalui relatif datar

Karena wilayah kabupaten dharmasraya berada di jalur lintas sumatera

Faktor penghambat

Proses pembebasan lahan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan permasalahan tugas pokok dan fungsi OPD adalah :

- ✓ Akreditasi UPTD KEUR, serta peningkatan pelayanan melalui penggunaan kartu uji UPTD KEUR elektronik.
- ✓ Pembayaran KIR sistem e-money

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ini, maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga memungkinkan Dinas Perhubungan dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dilihat pada table 4.1 berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			V/C (volume capacity Ratio)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	1 trayek	1 trayek	1 trayek	1 trayek	1 trayek
			persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	85%	87%	87%	88%	88%	90%
			akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	B	B	A	A	A	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai Reformasi Birokrasi						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	74,285	75	76	77	78	80

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Optimalisasi SDM dan Pendekatan Kinerja;
2. Penerapan perundang-undangan dibidang Perhubungan Meningkatkan kerjasama antar daerah;
3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawaasan pembangunan;
4. Melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku;
5. Pembinaan terhadap para penyedia jasa sebagai mitra kerja;
6. Peningkatan pendapatan guna pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang;
7. Mengusahakan sumber-sumber dana lainnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal;

✓ Bidang Perhubungan

Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut :

1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih;
3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas;
5. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang

ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll);

6. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan;

Adapun pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arahan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

VISI : Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya				
MISI: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	Meningkatkan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Peningkatan jaringan jalan yang berkeselamatan
				Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang inklusif
			Manajemen rekayasa lalu lintas	Penyusunan rencana jaringan rekayasa lalu lintas
			Optimalisasi Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan
				Peningkatan kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas
				Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum
				Pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
			Mengembangkan simpul jaringan transportasi terpadu	Fasilitasi perencanaan pengembangan transportasi prioritas nasional (jalan TOL, bandara, kereta api, ASDP)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Optimalisasi program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pembinaan SDM

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan.

Program/Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa Wilayah, Daerah, atau Kawasan. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel 5.1.

Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi																			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian urusan pemerin tahan			14,446,118,100		15,890,729,910		17,479,802,901		19,227,783,191		21,150,561,510		88,194,995,612	Dishub	Dishub
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 th	100,000,000	1 th	110,000,000	1 th	121,000,000	1 th	133,100,000	1 th	146,410,000	1 th	610,510,000	Dishub	Dishub
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14 bln	3,262,898,100		3,589,187,910		3,948,106,701		4,342,917,371		4,777,209,108		19,920,319,190	Dishub	Dishub
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 th	410,000,000.0	1 th	451,000,000.0	1 th	496,100,000.0	1 th	545,710,000.0	1 th	600,281,000.0	1 th	2,503,091,000	Dishub	Dishub

		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 th	458,460,000	1 th	504,306,000	1 th	554,736,600	1 th	610,210,260	1 th	671,231,286	1 th	2,798,944,146	Dishub	Dishub
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 th	704.770,000	1 th	3,802,747,000	1 th	6,703,221,700		4,581,343,870	1 th	5,067,478,257	1 th	20.859.560.827	Dishub/Pusat	Dishub
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 th	10,241,672,000	1 th	11,265,839,200	1 th	12,392,423,120	1 th	13,631,665,432	1 th	14,994,831,975	1 th	62,526,431,727	Dishub	Dishub
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 th	383,088,000	1 th	421,396,800	1 th	463,536,480	1 th	509,890,128	1 th	560,879,141	1 th	2,338,790,549	Dishub	Dishub
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang		1 keg	7.197.104.500	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	7.197.104.500	Dishub	Kab. Dharmasraya
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			1 pkt	85,000,000	1 pkt	105,000,000	1 pkt	110,000,000	1 pkt		1 pkt		1 pkt	300,000,000	Dishub	Dishub
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			15 pkt	224,717,500,000	15 pkt	6,005,250,000	15 pkt	6,473,275,000	15 pkt	7,210,602,500	15 pkt	7,911,662,750	15 pkt	32,318,290,250	Dishub/APBN	Dishub
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C			1 pkt	215,000,000	1 pkt	236,500,000	1 pkt	260,150,000	1 pkt	286,165,000	1 pkt	314,781,500	1 pkt	1,312,596,500	Dishub	Kabupaten / P. punjung
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1 th	1,447,500,000	1 th	1,152,250,000	1 th	1,600,475,000	1 th	1,394,222,500	1 th	1,570,644,750	1 th	7,165,092,250	Dishub	Dishub

		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			3 keg	177,104,500	3 keg	194,814,950	2 keg	117,496,445	2 keg	129,246,090	2 keg	142,170,698	12 keg	760,832,683	Dishub	Kabupaten
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabuapten/ Kota						195,000,000	2 keg	85,000,000	1 keg				7 keg	280,000,000	Dishub	Kabupaten
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			12 bln	170.000.000	12 bln	187,000,000	12 bln	205,700,000	12 bln	226,270,000	12 bln	248,897,000	60 bln	1,037,867,000	Dishub	Kabupaten
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anatar Kota Dalam Satu Daerah Kabupate/ Kota			1 th	150,000,000	1 th	165,000,000	1 th	3,181,500,000	1 th	199,650,000	1 th	219,615,000	1 th	3,915,765,000	Dishub	Kabupaten
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2 dok	235,000,000	1 dok	165,000,000	1 dok	181,500,000	1 dok	199,650,000	1 dok	219,615,000	6 dok	1,000,765,000	Dishub	Dishub
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tersedianya Jaringan Pelayanan ASDP		1 th	75,000,000	1 th	82,500,000	1 th	90,750,000	1 th	99,825,000	1 th	109,807,500	5 th	457,882,500	Dishub	Kabupaten

		2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah izin dan rekomendasi yang di keluarkan		1 th	75,000,000	1 th	82,500,000	1 th	90,750,000	1 th	99,825,000	1 th	109,807,500	5 th	457,882,500	Dishub	Kabupaten
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			1 th	295,000,000	1 th	459,500,000	1 th	340,450,000	1 th	522,995,000	1 th	575,294,500	5 th	2,193,239,500	Dishub	Kabupaten
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Tersedianya prasarana pendukung pembangunan bandara			40,000,000,000										40,000,000,000	Pusat	Kabupaten
		2.15.04.2.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Transportasi			1 pkt	40,000,000,000									1 pkt	40,000,000,000	Pusat	Kabupaten
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersedianya prasarana pendukung pembangunan perkeretaapian			775,000,000										775,000,000	Pusat	Kabupaten
		2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			1 dok	275,000,000									1 dok	275,000,000	Pusat	Dishub
		2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 dok	500,000,000									1 dok	500,000,000	Pusat	Kabupaten

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	V/C (volume capaciti Ratio)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.	jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	1 trayek	1 trayek	1 trayek	1 trayek	1 trayek	1 trayek
4.	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	85%	87%	87%	88%	88%	90%	90%
5.	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	B	B	A	A	A	A	A
	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Nilai Reformasi Birokrasi							
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	74,285	75	76	77	78	80	80

BAB 8. PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode Jangka Menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya serta penganggaran karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Gunung Medan, April 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

RAMILUS, SP.M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19670918 199203 1 004
